

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana alam dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, bahkan sering kali datang tanpa tanda-tanda terlebih dahulu. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menjadi hal yang sangat penting guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Masyarakat perlu memahami langkah-langkah penanggulangan bencana agar mampu mengurangi risiko, mempersiapkan diri menghadapi ancaman, menyelamatkan diri secara efektif, serta membangun kembali kondisi yang terdampak. Dengan demikian, masyarakat akan tumbuh menjadi kelompok yang tangguh, mandiri, dan mampu bertahan dalam menghadapi bencana.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana, tanggung jawab pelaksanaan penanggulangan bencana berada di bawah kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Lembaga ini memiliki peran penting dalam membangun ketangguhan masyarakat serta memberikan perlindungan dari ancaman bencana.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, menetapkan rencana penanggulangan bencana sesuai kewenangannya masing-masing. Rencana ini disusun berdasarkan data risiko bencana dalam kurun waktu tertentu dan dituangkan dalam dokumen resmi yang memuat program penanggulangan secara

menyeluruh. Di tingkat daerah, peran tersebut dijalankan oleh BPBD.

Upaya mengurangi dampak bencana seperti banjir dilakukan melalui pendekatan fisik dan non-fisik. Secara fisik, langkah-langkah meliputi pembersihan sungai, perbaikan tanggul dan pintu air. Sedangkan pendekatan non-fisik mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi, penegakan hukum, dan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Sayangnya, ketidaktahuan masyarakat mengenai jenis dan karakteristik bencana sering kali membuat mereka tidak siap saat bencana datang secara tiba-tiba, yang berdampak pada jatuhnya korban jiwa dan kerugian besar.

Peraturan Daerah ini memberikan landasan hukum dan kerangka kerja bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk nilai-nilai dasar, struktur kelembagaan, hingga pembagian kewenangan. Meskipun sudah diatur secara hukum, kenyataannya di lapangan masih ditemukan berbagai persoalan, khususnya terkait prinsip-prinsip penanganan yang belum berjalan efektif. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bengkulu menetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2017 sebagai regulasi yang mengatur proses penanggulangan bencana dari tahap pencegahan, saat terjadi bencana, hingga pemulihan pasca-bencana.

BPBD memiliki peran strategis dalam setiap fase bencana. Pada fase pra-bencana, fokusnya pada upaya

pencegahan dan kesiapsiagaan. Ketika bencana terjadi, BPBD bertanggung jawab dalam penyediaan logistik dan dukungan teknis. Setelah bencana, lembaga ini menjalankan fungsi pemulihan melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Di Kota Bengkulu, tercatat sebanyak 1.549 rumah terdampak banjir dan sekitar 500 kepala keluarga harus mengungsi. Banjir ini dipicu oleh curah hujan tinggi di wilayah Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu. Daerah rawan banjir mencakup Kelurahan Bentiring, Rawa Makmur, dan Pematang Gubernur di Kecamatan Muara Bangka Hulu; Sawah Lebar dan Sawah Lebar Baru di Kecamatan Ratu Agung; serta beberapa kelurahan di Kecamatan Sungai Serut seperti Tanjung Agung, Tanjung Jaya, Semarang, Surabaya, Kampung Klawi, Sukamerindu, dan Pasar Bengkulu. Hal ini menandakan perlunya penanganan banjir yang maksimal dari BPBD Kota Bengkulu.

Dampak bencana banjir mengancam kehidupan masyarakat secara luas. Karena itu, negara perlu hadir dalam bentuk upaya mitigasi yang sistematis. Penanganan bencana bukan hanya urusan individu, melainkan kewajiban pemerintah untuk menjamin keselamatan publik. Sebagai bentuk tanggung jawab tersebut, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 ditetapkan.

Namun, meskipun sudah ada regulasi yang jelas, kenyataannya penanganan banjir di Kota Bengkulu belum

maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi yang sistematis dan perencanaan yang matang dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Selain itu, tingkat kesiapsiagaan dan respons cepat juga masih rendah. Oleh karena itu, strategi pembangunan kelembagaan penanggulangan bencana harus diarahkan untuk mewujudkan visi sebagai institusi terdepan dalam membangun masyarakat yang siap, tanggap, dan tangguh terhadap bencana.

Banjir memiliki dampak serius, antara lain terganggunya akses air bersih, kerugian ekonomi, terhambatnya aktivitas masyarakat, munculnya penyakit, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa. Dalam ajaran Islam, bencana bisa terjadi karena tiga hal: kehendak Allah SWT, akibat perbuatan manusia, atau karena ketetapan yang telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 41 disebutkan:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S. Ar-Rum: 41)

Ibn Katsir menjelaskan bahwa kerusakan seperti gagal panen, kekeringan, dan banjir terjadi akibat dosa dan pelanggaran manusia terhadap aturan Allah. Al-Qurthubi menambahkan bahwa bentuk kerusakan tersebut juga mencakup ketidakadilan dan eksploitasi alam yang berlebihan.

Sementara itu, As-Sa'di dalam tafsirnya menekankan bahwa kerusakan alam merupakan akibat langsung dari perilaku moral manusia, namun sekaligus menjadi peringatan dan ujian agar mereka bertaubat serta memperbaiki diri.

Oleh sebab itu, penulis tertarik ingin meneliti permasalahan tersebut sehingga didapatkan solusi yang dapat membantu. Judul yang penulis angkat untuk skripsi ini adalah Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bengkulu Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar rumusan masalah lebih terarah, maka perlu adanya rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Pengaturan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bengkulu Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bengkulu

2. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bengkulu Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1) Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (*siyasah*) yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bengkulu Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.
- b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Tata Negara.
- c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.

2) Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bengkulu Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bengkulu Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

No	Nama dan Instansi	Objek Penelitian	Perbedaan
1.	Adinda Shofura, Skripsi, dengan judul <i>"Tanggung jawab Pemerintah Kota Bireuen Dalam Penanggulan Banjir Pada Lintasan</i>	Pada penelitian Adinda Shofura, objek penelitian nya yaitu Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam memelihara aset milik negara dalam konsep milk al-daulah. Dan untuk mengetahui bentuk tanggung	Perbedaanya ialah penelitian menunjukkan bahwa dalam penanggulangan banjir pemerintah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memelihara

	<i>Kecamatan Juli Dalam Perspektif Milk Al-Daulah</i>" Fakultas Syari'ah dan Hukum, Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tahun 2023	jawab Pemerintah Kota Bireuen dalam penanggulangan banjir pada lintasan Kecamatan Juli. Bencana banjir ini terjadi akibat curah hujan yang tinggi menyebabkan meluapnya atau merembesnya air di alue saluran pembuang jeumpa (irigasi alam) yang tidak lagi mampu menampung debit air hujan, selain itu juga kiriman dari dataran tinggi Bener Meriah dan mengakibatkan terjadinya banjir pada lintasan Kecamatan Juli merembesnya air ke permukiman dan membuat jalan rusak, rumah dan akses publik digenangi air sehingga menghambat dan menghalangi aktivitas dari pengguna jalan baik itu pengendara maupun pejalan kaki. Banjir yang terjadi di Kecamatan Juli ini juga	dan memperbaiki harta milik negara yang dibangun demi kepentingan umum. Adapun bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan banjir yaitu, membangun irigasi dan saluran air yang baik, memperbaiki harta milik negara yang rusak akibat banjir. Tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan banjir pada Lintasan Kecamatan Juli belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Milk Al-Daulah. Hal ini terlihat karena upaya pemerintah yang belum optimal
--	--	--	---

		menyebabkan tanggul disamping irigasi menjadi roboh sehingga mengganggu para petani yang membutuhkan air untuk padinya.	dalam pengecekan dan pembersihan saluran air serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam penanggulangan banjir. ¹
2.	Prima Agus Septiyan, Skripsi, Dengan Judul <i>"Peran Pemerintah Kota Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Lokasi Rawan Banjir Di Kota Parepare Analisis Kajian Siyasah Dusturiyah"</i> Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Hukum Tata Negara,	Pada penelitian Agus Septiyan, objek penelitiannya yaitu Untuk mengetahui peran Pemerintah Kota (BPBD) dalam pengawasan dan pengendalian lokasi rawan banjir di Kota Parepare. Dan mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami pemerintah kota dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian lokasi rawan banjir di Kota Parepare. Bencana banjir yang terjadi di kota Parepare	Perbedaannya menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Parepare sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemeran utama dalam penanggulangan bencana, khususnya banjir sesuai undang-undang dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Dalam hal ini, faktor yang mendukung

¹ Adinda Shofura, Skripsi: *Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bireuen Dalam Penanggulangan Banjir Pada Lintasan Kecamatan Juli Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tahun 2023, h. 46

	IAIN Parepare. Tahun 2023	dua bulan yang lalu di sebabkan oleh beberapa faktor : (1) Hujan Deras (2) Pasangnya air laut dan (3) Meluapnya Daerah Aliran Sungai (DAS). , Sehingga akibatnya beberapa Lokasi di Parepare terendam Banjir, contohnya di kawasan tegal, perumahan savaras, kecamatan bacukiki, Sehingga dalam peristiwa banjir tersebut kiranya perlu adanya Perhatian ekstra dari pihak Pemerintah Kota ke depan dalam rangka Penanggulangan-nya baik dari segi Pengawasan maupun pengendalian.²	penanganan banjir, baik sebelum dan setelah banjir yaitu kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, tidak membuang sampah di selokan, selain itu adanya sosialisasi dari pemerintah yaitu peringatan dini dari BPBD sebelum terjadi bencana, media pelaporan yang mudah di hubungi lewat nomor 112 terpadu ketika terjadi bencana, kemudian dukungan masyarakat yang saling gotong royong membantu korban banjir.³
--	------------------------------	---	--

² <https://Repository.Iainpare.Ac.Id/Id/Eprint/6191/1/18.2600.044.Pdf>

³ Prima Agus Septiyan, Skripsi: "Peran Pemerintah Kota Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Lokasi Rawan Banjir Di Kota Parepare Analisis Kajian Siyasa

3.	Danny Permana, Jurnal DIALEKTIKA Dengan Judul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Risiko Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung": Jurnal Ilmu Sosial, Vol 21 No. 2 2023, Universitas Jendral Achmad Yani	Pada penelitian Danny Permana, objek penelitiannya yaitu Kabupaten Bandung melakukan bentuk peningkatan kapasitas masyarakat berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan banjir terutama pada musim penghujan tiba dan memberikan peringatan dini. Dalam meningkatkan kesiapsiagaan rutin mengadakan gladi posko dan gladi lapangan dengan hasil baik BPBD maupun masyarakat mendapat gambaran langsung ketika bencana terjadi sehingga saat terjadi bencana dapat tercipta koordinasi dan tindakan yang terukur. Dalam peran sebagai strategi, instansi	Perbedaannya ialah penelitian ini dibuat karena perlunya optimalisasi peran pemerintah daerah terhadap penanggulangan risiko banjir di Kabupaten Bandung. Serta ditemukan bahwa BPBD Kabupaten Bandung melakukan bentuk peningkatan kapasitas masyarakat berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan banjir, dan memberikan peringatan dini. Dan berstrategi dengan instansi lain untuk

		yang paling sering kita andalkan untuk menjadi mitra koordinasi ialah dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk bantu dalam mengeksekusi langsung karena personil BPBD sendiri yang terbatas serta sarana dan prasarana yang masih kurang secara kuantitas. Dalam peran sebagai alat komunikasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung menyadari peningkatan kapasitas aparatur sangat diperlukan terutama saat tanggap darurat dan tahap penanggulangan risiko bencana. Serta adanya Program sebagai sarana komunikasi yang sedang disusun yaitu memberdayakan dan	membantu dalam mengeksekusi program secara langsung.⁵
--	--	---	---

⁵ D Permana, Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Risiko Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung, *Jurnal Ilmu Sosial*, Volume 21 Nomor 2 Tahun 2023, H. 31

		berkoordinasi dengan kelompok masyarakat seperti anggota pramuka dan taruna siaga bencana untuk membantu masyarakat dalam penanggulangan risiko bencana. Dalam peran sebagai alat penyelesaian sengketa, penanggulangan bencana banjir merupakan sebuah permasalahan yang kompleks yang tidak hanya bertumpu pada satu organisasi yaitu BPBD saja namun membutuhkan koordinasi lintas bidang. ⁴	
--	--	--	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu

4

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.⁶ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Tanfidziyah.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum pendekatan tertentu sebagai dasar -memerlukan pendekatan pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian :hukum adalah sebagai berikut⁷

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.⁸

Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa

⁶ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 1

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h 133

⁸ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34

penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*Ius constituendum*).

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan (*Statute Approach*). Pendekatan Perundang Undangan yanag dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Perundangan ini contohnya dilalukan dengan pendekatan Perundang undang dasar dengan memahami kesesuaian antara Undang Undang yang satu dengan Undang Undang yang lain.

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani (Peter Machmud. 2011: 93). Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara

umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan statute berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.⁹

2. Waktu dan lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 bulan dan dilaksanakan pada Bulan Desember 2024 sampai Januari 2025 serta dilakukan penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwa Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bengkulu Perspektif Siyash Tanfidziyah, kurang maksimal dalam pengendalian dan pengawasan terhadap benih lobster. Karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang

⁹ <https://Repository.Ump.Ac.Id>

ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah:¹⁰

Tabel 1.1

No	Instansi/Masyarakat	Nama	Jabatan
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu Dan BASARNAS Kota Bengkulu	1.Will Hopi, SH.MH 2.Firmanto,ST 3.Muslikun Sodik,S.K.M	1.Kepala Badan BPBD Kota Bengkulu 2.Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan 3.Kepala Kantor BASARNAS Kota Bengkulu
2.	Masyarakat Kota Bengkulu	1.Rusdan Tafsili 2.Hengki 3.Herman 4.Ansori 5.Sukma	1. Tokoh Masyarakat 2. Warga Tanjung Agung 3. Warga Tanjung Agung 4. Warga Tanjung Agung 5. Warga Tanjung Agung

¹⁰ <http://Repository.Stei.Ac.Id/8208/4/BAB%203.Pdf>

*Summber Badan Penangngulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kota Bengkulu*

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹¹ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Tanggung Jawab Pemerintah

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ... h. 81

Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bengkulu Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.¹²

2) Data Sekunder

buku teks Bahan hukum sekunder yang utama adalah prinsip dasar ilmu -karena buku teks berisi mengenai prinsip pandangan klasik para sarjana yang -hukum dan pandangan .mempunyai kualifikasi tinggi¹³Dalam penelitian ini bahan :hukum sekunder yang digunakan meliputi

- (1) buku ilmiah dibidang hukum-Buku
- (2) Jurnal ilmiah.
- (3) Artikel ilmiah

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer :dan sekunder, yaitu

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- 2) ensiklopedia, wikipedia dan situs di Internet seperti-Situs .yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumentasi.

1) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak

¹² <https://proceeding.unindra.ac.id>

¹³ *Penelitian Hukum* ,Peter Mahmud Marzuki,... h 182

diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Tanfidziyah, (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.¹⁴ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

2) Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan

¹⁴ Basrowi Dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 127

penelitian yang dilakukan.¹⁵ Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Tanfidziyah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.¹⁶ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

¹⁵ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 184

¹⁶ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan Ke-7, 2017, h. 97

¹⁷ <https://codingstudio.id/blog/teknik-analisis-data-kualitatif>

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

Bab II Landasan Teori

Teori Penegakan Hukum, Teori Peraturan Daerah, dan Teori Siyasah Tanfidziyah.

Bab III. Gambaran Umum Objek Penelitian.

Bab IV Pembahasa

Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Tanfidziyah.

Bab V Penutup

Kesimpulan dan Saran.